

SULAWESI UTARA

PD PELAYARAN SITARO

Aktivis Sulut Endus Dugaan Korupsi di PD Pelayaran Sitaro

Aktivis Sulawesi Utara Sarry Utho menyebutkan bahwa dugaan korupsi tercium sudah di area Perusahaan Daerah (PD) Pelayaran Sitaro yang tidak lain adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Diduga kuat PD Pelayaran Sitaro menjadi tempat 'maling' kekayaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Data valid atas dugaan korupsi yang dilakukan PD Pelayaran Sitaro tersebut telah dikantongi. Sebagai informasi, sejak 2010 PD Pelayaran Sitaro menerima penyertaan modal dari pemkab senilai satu miliar rupiah. Kemudian pada 2011, melalui Kementerian Perhubungan RI setiap tahunnya PD Pelayaran Sitaro mendapat subsudi anggaran dari Kementerian Rp14 miliar setiap tahunnya sampai dengan saat ini. Dugaan korupsi tersebut mulai muncul ke permukaan disebabkan tertutupnya Income PD Pelayaran yang secara terbuka diketahui juga oleh DPRD Kabupaten. Hal tak terduga juga didapati pada saat melakukan investigasi oleh tim bahwa PD Pelayaran Sitaro sudah bertolak belakang dengan PP No 54 tahun 2017 tentang aturan Direksi BUMD yang tidak secara definitif. (Sumber: https://palakat.id/aktivis-sulut-endus-dugaan- korupsi-di-pd-pelayaran-sitaro/ tanggal 4 April 2023)

PD PASAR KOTA MANADO

RAKO Sulut Desak Polresta Manado Segera Periksa Tiga Direktur Terkait Dugaan Korupsi 2,9 Miliar PD Pasar Manado

Dugaan korupsi PD Pasar Manado sejak tahun 2019-2022 di era kepemimpinan tiga Direktur PD Pasar Manado yakni Stenly Suwuh, Roland Roeroe dan Joootje Rumondor alias Ocen harus segera ditindaklanjuti. Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi (Rako) Sulut, Hariyanto, mendesak Polresta Manado untuk tidak mendiamkan dugaan kasus korupsi senilai 2,9 miliar di tubuh PD Pasar Kota Manado. LSM RAKO juga meminta Polresta Manado untuk melakukan prinsip kerja yang presisi agar proses hukum secepatnya di selesaikan Jangan berlarutlarut, karena akan berdampak kurang baik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian RI. (Sumber: https://swarakawanua.id/rako-sulut-desak-polresta-manado/ tanggal 22 Maret 2024).

PDAM MANADO

Adanya Korupsi, LSM Inakor Mendesak Polda Sulut Atensi Temuan BPK Ketua Harian DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Independen - Nasionalis Anti Korupsi (LSM - INAKOR) meminta KPK RI, Kejaksaaan Tinggi, dan Polda Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti temuan BPK Sulawesi Utara soal retribusi dan kekurangan volume nilai sejumlah Rp11.990.395.243,36 serta permasalahan penyajian nilai penyertaan modal pemkot dalam investasi permanen di PDAM Manado. Pihaknya memandang temuan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara serta diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi. (Sumber: https://www.suaramabes.com/adanya-korupsi-lsm-inakor-mendesak-poldasulut-atensi-temuan-bpk/ tanggal 27 Juni 2023)